



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Ambon Eskpres, 18 Oktober 2016

Mantan Gubernur Digarap Jaksa

AMBON,AE—Mantan Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu, Senin kemarin memenuhi panggil jaksa guna menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Ralahalu ditanyai puluhan pertanyaan seputar dugaan masalah anggaran study kelayakan pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2015 senilai Rp.800 juta.

Pemeriksaan berupa permintaan keterangan dari mantan Gubernur Maluku ini, berkaitan dengan permintaan Ralahalu kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk membangun bandara di Arara. Hal itu diajukan mantan Gubernur Maluku dua periode ini lantaran di Arara terdapat perusahaan tambak udang, PT Wahana Lestari Investama.

Jika pembangunan Bandara di Arara di realisasikan maka akan memberikan kemudahan akses bagi pengoperasian PT Wahana Lestari Investama dalam hal produksi. Hanya saja, permintaan yang diajukan Ralahalu itu berujung dugaan korupsi.

Pantauan koran ini, Karel Albert Ralahalu senin kemarin mendatangi kantor Kejati Maluku sekitar pukul 13.45. Ralahalu kemudian masuk dan menuju lantai dua. Pemeriksaan yang berlangsung di Aula Kejati Maluku itu, berakhir pukul 18.15. Dengan santai, Ralahalu menyapa para awak media yang telah menunggunya untuk diwawancarai.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2013, pemerintah bisa memberikan bantuan kepada para pengusaha daerah maupun swasta. Sehingga, pengusulan untuk membangun Bandara Arara, menurutnya tidak melanggar aturan.

“Karena memang, perusahaan daerah maupun swasta membangun wilayah atau membangun daerah. Swasta juga memberikan kontribusi baik bagi negara maupun bagi daerah, dan swasta juga memberikan lapangan pekerjaan. Jadi memang ada ketentuan itu karena pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan swasta maupun daerah, “jelasnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Menyoal adanya dugaan korupsi anggaran study kelayakan bandara Arara, Ralahalu tidak mengetahuinya. Karena hal itu lebih diketahui oleh pihak kejaksaan. Namun yang pasti, pengajuan permintaan bandara di Arara itu, bukan diperuntukan untuk umum, melainkan hanya bandara khusus.

Terkait apakah sudah dilakukan Survei, Ralahalu juga tidak mengetahuinya. Ralahalu memastikan, hal itu lebih diketahui oleh pihak Dinas Perhubungan.

Ralahalu mendukung proses hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jika ada perbuatan melawan hukum yang berujung pada dugaan korupsi, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Bagi saya, silakan kejaksaan melihat masalah ini dengan baik. Kalau memang ada pelanggaran, silakan diproses dengan baik sesuai hukum yang berlaku, “pungkas Ralahalu.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Malteng di Wahai, Ajit Latuconsina mengatakan, permintaan keterangan dari mantan Gubernur Maluku, KAREL Albert Ralahalu, seputar permohonan dari PT Wahana Lestari Investama untuk membangun bandara di Arara.

“30 pertanyaan Seputar permohonan dari PT Wahana terkait pembangunan Bandara di Arara. Ada dokumen yang diserahkan beliau (Ralahalu, red), “jelasnya.

Menurut Ajit, selama pemeriksaan berlangsung, Ralahalu sangat kooperatif serta memberikan keterangan yang membantu penyelidik dalam mengungkap kasus tersebut. Disinggung soal keterangan yang diberikan Ralahalu, Ajit merahasiakannya, karena merupakan materi kasus. “Yang pasti beliau sangat kooperatif dan cukup membantu kita dalam menungkap kasus ini, “tegasnya.

Kapan Kadis Perhubungan Benny Gasperz dipanggil, Latuconsina menambahkan pihaknya masih berkoordinasi dengannya. Panggilan akan dijadwalkan namun belum ditentukan kapan. “Yang pasti kita akan koordinasi dengan Kadis. Dan tetap kita akan panggil, “pungkasnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Sementara itu, sumber koran ini di Kejati Maluku membeberkan, tim penyelidik telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan korupsi anggaran studi kelayakan proyek perencanaan pembangunan bandara di Arara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Alhasil, sudah ada beberapa pihak yang diduga paling bertanggungjawab dalam kasus itu.

Tiga orang diantaranya merupakan pejabat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku. sedangkan dua lainnya dari pihak perusahaan atau kontraktor. “Inisialnya BG, AW dan JR. Sedangkan dua pihak yang diduga turut bertanggungjawab itu pihak kontraktor dari PT Benatin Surya Cipta. Yakni, B dan WB,” kata sumber koran ini.

Menurut sumber terpercaya koran ini di Kejari Malteng cabang Wahai, lima pihak yang diduga bertanggungjawab itu, karena kejahatan yang dilakukan mereka yakni mencantumkan nama 11 ahli untuk ikut dalam studi kelayakan proyek perencanaan pembangunan bandara di Arara. Sementara 11 ahli tersebut tidak tahu soal adanya proyek tersebut.

“Dari bukti-bukti selama proses penyelidikan, terungkap bahwa 11 ahli yang dicantumkan dalam dokumen proyek adalah fiktif. Karena 11 ahli yang dipakai untuk melakukan studi, itu orang-orang yang tidak memiliki keahlian apapun, “beber sumber.

Meski begitu, sumber mengatakan proses penyelidikan masih berlanjut, sehingga bukti-bukti terus dikumpulkan guna kepentingan penyelidikan.”Kalau eksphose belum tahu. Yang pasti proses penyelidikan masih lanjut, “pungkas sumber. (AFI)